

BAB II

KAPITALISASI DALAM INDUSTRI FILM

DAN GERAKAN FEMINISME DI INDONESIA

Film *27 Steps of May* merupakan film yang mengisahkan trauma seorang perempuan akibat kekerasan seksual yang dialaminya saat ia berusia 14 tahun. Selama 8 tahun setelah kejadian tersebut, May terus hidup dalam trauma dan mengurung diri dalam kamarnya. Film yang disutradarai Ravi Bharwani dan penulis cerita Rayya Makarim ini telah melalui 5 tahun riset dan siap ditayangkan pada tahun 2018. Film ini mulai tayang di berbagai film festival dunia pada Oktober 2018 hingga pada April 2019 mulai merambah ke bioskop komersil tanah air. Pada bab ini akan menjabarkan bagaimana kapitalisasi yang dilakukan dalam industri film serta gerakan feminisme di Indonesia. Secara lebih spesifik akan melihat pada isu apa saja yang menjadi perhatian gerakan feminis tersebut dikaitkan dengan isu yang menjadi objek penelitian kajian ini.

2.1.KAPITALISASI INDUSTRI FILM INDONESIA

Faktor utama perkembangan industri antara tahun 1890-1910 yang menarik bagi pebisnis adalah pengembangan inovasi pada teknologi film dan meningkatnya permintaan akan hiburan. Pengembangan sistem pengiriman distribusi khusus dimana

bioskop secara eksklusif digunakan untuk mempertontonkan film, berfungsi sebagai batas untuk pengembangan produksi dan distribusi film agar tidak menyebar secara ilegal (Bakker, 2008 : 169).

Dalam istilah ekonomi, film adalah mesin raksasa yang menghasilkan sebuah tontonan. Pada awal perkembangannya film hitam putih diproduksi setelah itu kemudian dapat dikembangkan film berwarna yang diproduksi dalam jumlah besar yang tak terbatas. Film kemudian digunakan dalam sejumlah besar pertunjukan untuk dapat disaksikan sejumlah penonton. Pada tahun 1920 an film dapat dianggap barang modal, dan produser berharap bahwa semakin banyak pengeluaran untuk membuat film akan menghasilkan lebih banyak penonton. (Bakker, 2008 : 182)

Aspek yang mendasari sejarah film adalah sekumpulan karakteristik yang mendefinisikan dan membedakan film sebagai jenis komoditas. Karakteristik ini secara konseptual membatasi cara di mana film sebagai jenis komoditas telah dikembangkan

oleh kapitalis dalam mencari keuntungan dan digunakan oleh konsumen dalam pemenuhan kebutuhan. Ada dua aspek eksistensial untuk film sebagai komoditas. Pertama, materi, aspeknya seperti strip fotografi pada seluloid yang disalin identik dengan aslinya (*template*), materi tersebut merupakan objek transaksi antara produsen,

distributor dan pihak penayang. Transaksi ini didasarkan pada antisipasi yang timbul dari aspek kedua yaitu immaterial, yang merupakan bentuk dimana film dapat dikonsumsi dalam pikiran setiap penonton bioskop. (Sedgwick, 2004 : 11)

Dasar dari penerimaan yang dilakukan oleh penonton film adalah harapan terciptanya kepuasan. Pengalaman yang telah diperoleh seseorang dari kegiatan menonton film membentuk budaya tersendiri bahwa menonton film menjadi kegiatan rekreasi (mencari penghiburan) yang populer. Hal ini menyiratkan bahwa penonton film akan memiliki preferensi yang kuat tentang apa yang mereka sukai. (Sedgwick, 2004 : 11).

Peredaran film nasional maupun film asing berubah menjadi persaingan untuk meraup untung dan menjadi pilihan utama penonton. Seperti yang dituliskan Pusat Data dan Analisa Tempo, tahun 1991 DPR RI memanggil Subentra Group sebagai grup yang dituding menguasai peredaran film asing sehingga membuat film nasional terjepit. Perwakilan Subentra Group tidak membenarkan adanya monopoli, asosiasi importir film justru dirasa positif karena membantu pemerintah membeli, mengimpor dan mengedarkan film impor yang sampai tahun 1980 an masih semrawut. Film Indonesia sudah diatur jadwal peredarannya setiap triwulan oleh PT Perfin (Peredaran Film Indonesia) agar setiap film Indonesia mendapatkan penonton sebanyak-banyaknya. (Pusat Data dan Analisa Tempo, 2019 : 18).

Film Indonesia pada tahun 90 an bersaing ketat dengan film India dan film Mandarin. Sutradara Asrul Sani pernah mengatakan, dahulu saingan film Indonesia memang film India dan Mandarin, namun sekarang tidak lagi, semua film memiliki kelasnya masing-masing. Film kelas bawah misalnya, kalau ingin laris film India harus bertema hiburan, film Mandarin bertema action, sedangkan film Indonesia kalau bukan silat, mistik, banyolan ya buka-bukaan. Film drama dan sejarah yang

perlu pemikiran lebih tinggi bisa bersaing di kelas atas. (Pusat Data dan Analisa Tempo, 2019 : 36)

Saat ini pasar industri film Indonesia dibidang cukup menjanjikan dilihat dari jumlah penonton, jumlah film dalam negeri, dan jumlah layar lebar yang tersedia di seluruh Indonesia. Wakil Kepala Bekraf, Ricky Pesik mengatakan bahwa pertumbuhan jumlah penonton bioskop Indonesia meningkat pesat dan mencapai 230 persen dalam lima tahun terakhir. Jumlah layar lebar di Indonesia juga bertumbuh pesat dua kali lipat dari 800 layar lebar menjadi 1.800 layar dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Indonesia kemudian dikenal sebagai pasar film *box office* terbesar ke-16 dunia dengan nilai pasar US\$ 345 juta atau sekitar 4,8 triliun rupiah. (www.katadata.co.id diakses pada 3 Juli 2020 pukul 17.20 WIB)

Melihat perkembangan positif industri film Indonesia, sejumlah inovasi juga dikembangkan pemerintah untuk memfasilitasi sineas dalam memproduksi film. Pada level nasional pemerintah menerbitkan beberapa kebijakan baru untuk mendorong kompetisi dan mendukung pertumbuhan film Indonesia. Melalui Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2016, pemerintah membuka pintu investasi asing di bidang perfilman dengan merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI). Dengan peraturan tersebut, persentasi investasi asing diijinkan mencapai batas maksimal. Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) turut memfasilitasi akses permodalan melalui forum pendanaan film yaitu Akatara. (BEKRAF, 2019 : 26)

Produksi film nasional juga mendapat keuntungan lain dengan kebijakan pembentukan Komisi Film Daerah (KFD) yang merupakan kolaborasi BEKRAF

dengan Badan Perfilman Indonesia (BFI) dan mulai diluncurkan di berbagai kota sejak pertengahan tahun 2018. Kebijakan ini akan memberikan kemudahan perizinan dan insentif pajak lokal yang diharapkan dapat memfasilitasi produser dan perusahaan film dalam memanfaatkan potensi sejumlah wilayah di Indonesia sebagai lokasi pengambilan gambar. Industri film tanah air tampak akan semakin menguat dengan bantuan kapital dan iklim investasi yang positif. (BEKRAF, 2019 : 26)

Iklim industri film yang positif ini tentu harus dibarengi dengan SDM yang mumpuni untuk dapat memproduksi film yang berkualitas sehingga dapat bersaing. Dalam lima tahun terakhir, film Indonesia banyak menghadirkan aktualitas dan konteksnya melalui tema dan genre yang semakin beragam. Pada FFI 2019 misalnya, film peroleh piala citra menghadirkan aktualitas tema seperti film Dua Garis Biru, Keluarga Cemara dan 27 Steps of May. (www.filmindonesia.or.id diakses pada 3 Juli 2020 pukul 18.13 WIB)

Film 27 Steps of May yang dijadikan objek dalam penelitian ini menampilkan aktualitas tema tentang trauma terhadap kekerasan seksual yang dialami oleh wanita. Film ini beredar di berbagai film festival dunia sejak 2018, barulah pada April 2019 dapat ditonton di bioskop tanah air. Ravi Bharwani selaku sutradara mengambil momentum waktu tayang film ini bersamaan dengan adanya *Women's March* di Jakarta. Meski begitu waktu perilisasi juga melalui banyak pertimbangan karena bioskop tanah air juga sedang didominasi film box office Avengers : End Game. (www.katadata.co.id diakses pada 3 Juli 2020 pukul 18.25 WIB)

Meski tayang bersamaan dengan film box office Avengers : End Game, pemain film 27 Steps of May tetap optimis film ini memiliki daya tariknya tersendiri bagi penikmat film. Verdi Solaiman, salah satu pemain film 27 Steps of May mengungkapkan bahwa di Indonesia isu kekerasan seksual masih dianggap enteng, namun melalui film 27 Steps of May akan diperlihatkan bagaimana trauma akibat kekerasan seksual dapat berlangsung lama. Ia yakin 27 Steps of May bahkan bisa bersuara lebih besar daripada film Avengers sekalipun. (www.womantalk.com diakses pada 3 Juli 2020 pukul 18.31 WIB)

2.2.GERAKAN FEMINISME DI INDONESIA

2.2.1. Sejarah Gerakan Perempuan di Indonesia

Gerakan feminisme atau disebut dengan istilah “*women’s movement*” (gerakan perempuan) sudah ada sejak dulu baik yang tercatat sejarah maupun tidak. Feminisme seringkali diasumsikan sebagai ideologi Barat, namun inti dari gerakan feminisme akan berakar dari prinsip-prinsip dan budaya sendiri. Sejarah panjang feminisme di Indonesia selalu berakar pada gerakan untuk memperjuangkan emansipasi wanita atau persamaan hak tanpa adanya diskriminasi dan bagaimana perempuan harus memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mengembangkan diri. Gerakan perempuan yang hingga kini masih diingat oleh semua generasi adalah RA. Kartini yang memperjuangkan hak perempuan Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. Gerakan perempuan di Indonesia tampak dari setiap periode

pemerintahan dan mempunyai karakteristiknya masing-masing. (Blackburn, 2004 : 17-31)

1. Periode Kolonial (1900-1942)

Pada periode ini, Indonesia masih berada pada masa penjajahan oleh bangsa Belanda. Perhatian khusus bagi otoritas Belanda sehubungan dengan gender adalah pendidikan anak perempuan, perkawinan antara orang Eropa dan 'penduduk asli' dan hak asuh keturunan mereka, dan prostitusi yang dilakukan oleh tentara. Namun pada kenyataannya kebijakan tersebut masih sangat dipengaruhi kebutuhan untuk kepentingan ekonomi. Pendidikan kolonial yang kala itu diberikan pada rakyat Indonesia membantu wanita untuk berbicara di depan umum dan mengekspresikan persepsi mereka tentang kebutuhan perempuan.

Pertentangan kaum perempuan justru datang dari salah satu anak priyayi Jawa yaitu Raden Ajeng Kartini, kala itu ia merupakan salah satu perempuan Indonesia yang berpendidikan. Kartini merasa kesal atas pembatasan yang dihadapi perempuan yang ingin melanjutkan sekolahnya setelah tingkat dasar yang dianggap cukup oleh orang tuanya. Pada masa itu, perempuan ditakdirkan untuk dinikahkan pada usia remaja. Kartini kemudian menjadi pelopor emansipasi wanita dan ditandai sebagai langkah penting dalam pengakuan perasaan dan kebutuhan perempuan Jawa. Setelah Kartini meninggal di tahun 1904, banyak organisasi perempuan yang berdiri untuk memperjuangkan hak perempuan.

Organisasi perempuan pertama yang terbentuk adalah Poetri Mardika pada tahun 1912 dengan bantuan organisasi Budi Utomo disusul oleh organisasi wanita

Islam Aisyiyah yang bertahan hingga 1917. Hingga mulai tahun 1920 beberapa organisasi wanita bergabung dan lebih terkordinasi yang pada tahun 1928 terbentuk federasi perempuan. Perhatian utama federasi adalah untuk mempromosikan pendidikan anak perempuan dan meningkatkan posisi hukum perempuan, termasuk pada hubungan pernikahan. Federasi ini juga berusaha mempertahankan persatuan dan menyatukan pendapat terutama pada pandangan berbeda tentang poligami yang dianggap perbuatan terkutuk oleh asosiasi Islam.

2. Periode Pendudukan Jepang 1942-1945

Jepang yang menang melawan Belanda kemudian menduduki Indonesia selama Perang Pasifik. Laki-laki harus bergabung dengan pasukan pertahanan dan bekerja dengan menyediakan tenaga kerja dan memproduksi barang untuk berperang, sementara perempuan diwajibkan untuk mendukung kaum lelaki dan dalam kasus wanita yang lebih muda akan melayani tentara militer sebagai pelacur. Pada periode ini organisasi perempuan terbagi menurut pembagian daerah militer dan dibentuk untuk memanfaatkan wanita dalam mendukung peperangan. Organisasi di Jawa dan Bali organisasi wanita disebut Fujinkai dan di Sumatra dinamai Hahanokai.

Kegiatan organisasi perempuan yang dibuat oleh Jepang berpusat pada gerakan nasionalisme dan memberi kontribusi ekonomi untuk pemerintah Jepang. Wanita yang lebih muda diharapkan berkontribusi untuk pertahanan dan bergabung dengan Barisan Srikandi (Brigade Srikandi) di mana mereka belajar pertolongan pertama, pertahanan diri dan persiapan makanan untuk pasukan sukarelawan. Selama Pendudukan Jepang gerakan wanita tidak dapat menghasilkan apa-apa untuk

menuntut negara dan mendapatkan hak mereka dan tidak dapat berorganisasi secara independen.

3. Periode Masa Revolusi Perjuangan Kemerdekaan (1945-1949)

Begitu penjajahan Jepang berakhir, organisasi wanita independen muncul kembali, sebagian besar didedikasikan untuk mendukung Republik baru. Salah satu organisasi yang paling lama berdiri dan merupakan organisasi awal non-agama adalah Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari). Organisasi lain yang berdiri pada masa revolusi ini adalah Muslimat NU, sayap perempuan Islam Jawa tradisional yang besar dari organisasi Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1946 beberapa organisasi perempuan membentuk federasi berorientasi nasionalis baru, Kongres Wanita Indonesia (Kowani).

Selama perjuangan untuk kemerdekaan, upaya organisasi perempuan berfokus pada kelangsungan hidup keluarga di masa yang sangat sulit dan dukungan untuk tujuan nasionalis. Beberapa unit pertempuran wanita dibentuk, tetapi kegiatan yang lebih umum adalah memberikan pertolongan pertama dan makanan untuk prajurit dan layanan sipil. Meskipun selama revolusi negara tidak dapat melakukan banyak hal untuk perempuan namun pergerakan perempuan dibutuhkan untuk mendukung prinsip kesetaraan setelah pengalihan kedaulatan dari Belanda.

4. Periode Negara Demokratis (1949-1958)

Setelah pengalihan kedaulatan, Indonesia menggunakan rezim parlementer. Orientasi demokratis dari pemerintahan awal Indonesia berarti mereka harus memperhitungkan suara perempuan, yang juga menjadi pemilih pada pemilihan

umum pertama tahun 1955. Rancangan awal pemerintah dalam memperjuangkan kesetaraan dituangkan dalam undang-undang yang mencakup upah yang sama untuk pegawai negeri sipil, dan promosi pendidikan massal dan melek huruf untuk orang dewasa.

Organisasi wanita berkembang selama periode ini, meskipun pertumbuhannya dibatasi di wilayah besar nusantara di mana pendidikan dan komunikasi buruk. Organisasi besar yang paling aktif dalam federasi adalah Kowani, dan yang paling vokal dalam mewakili perempuan ke negara adalah Perwari dan Gerwani, sebuah organisasi yang lebih radikal. Dalam pemilu 1955, 19 dari 271 anggota parlemen yang terpilih adalah wanita. Setelah awal yang menjanjikan selama periode Revolusi, tidak ada lagi menteri wanita di banyak kabinet tahun 1950-an. Gerakan perempuan pada periode ini sebagian besar untuk memperjuangkan hukum perkawinan tetapi sebagian besar diabaikan oleh negara.

5. Periode Demokrasi Terpimpin (1958-1965)

Organisasi wanita dominan di era Demokrasi Terpimpin adalah Gerwani, agenda Gerwani adalah tentang isu-isu perempuan, yang harus tunduk pada agenda nasionalis dan anti-imperialis Presiden (dan PKI). Pada periode ini perempuan memiliki sedikit kesempatan untuk menyuarakan keprihatinan mereka kepada negara, negara juga menunjukkan sedikit minat dalam mempertimbangkan kebutuhan perempuan. Selama Demokrasi Terpimpin dampak negara pada kehidupan perempuan terbilang buruk, karena pengabaian ekonomi pada tahun-tahun ini.

6. Periode Orde Baru (1965-1998)

Orde Baru melihat wanita sebagai kelompok struktural yang signifikan dalam masyarakat dan berperan dalam memastikan stabilitas sosial, melaksanakan rencana pembangunan serta mengurangi angka kelahiran. Pada awal rezim orde baru, perempuan dianggap sebagai ibu rumah tangga dan seorang ibu. Perempuan akan selalu dikaitkan dengan kodrat mereka sebagai pembentuk dan pengajar bagi anak atau generasi yang lebih muda. Pembentukan karakter terkait sosial dan politik antara 'bapak' dan 'ibu' sangat kuat pada rezim ini, 'bapak' berperan menikmati kekuasaan dan hak keistimewaan namun tidak didapatkan oleh 'ibu' yang melakukan kegiatan-kegiatan praktis tanpa prospek imbalan kecuali melalui suami mereka.

Puncak 'ibuisme negara' adalah fenomena yang dikenal sebagai organisasi istri. Dengan bertambahnya jumlah dan ukuran organisasi semacam itu, mereka mendominasi federasi perempuan, Kowani. Organisasi istri yang paling terkenal dan terbesar adalah Dharma Wanita, untuk istri pegawai negeri. Aktivitas Dharma Wanita terkait dengan pengembangan di awal tahun 1970-an Gerakan Pembinaan Keluarga yang disponsori negara (PKK) dibawah kendali pusat Menteri Dalam Negeri, memiliki cabang di setiap tingkat masyarakat yang dipimpin oleh istri-istri pejabat negara. Kemunculan organisasi ini untuk mendukung dan mensukseskan pembangunan dengan mensukseskan program Keluarga Berencana dalam mengontrol laju kelahiran bayi. Pada periode ini, organisasi yang ada belum dapat dikatakan sebagai organisasi feminis mengingat seluruh keanggotaannya masih mencerminkan dominasi laki-laki terlihat pada struktur keanggotaannya yang berisi istri-istri pegawai dan diketuai istri pejabat pemerintahan.

7. Periode Reformasi (1998-2003)

Setelah terbebas dari ideologi Orde Baru, peran Kementerian Perempuan menjadi lebih bersuara dalam mengkritik kebijakan pemerintah dari sudut pandang kesetaraan gender. Tanpa dukungan sponsor negara dan kekuasaan, Dharma Wanita dan PKK harus beradaptasi dengan dunia di mana ideologi gender telah berubah dan dasar untuk keanggotaan mereka menjadi murni sukarela. Ini adalah keuntungan besar bagi kelompok lain yang merasa dikekang oleh pejabat dalam gerakan wanita tersebut.

Organisasi wanita telah memainkan peran penting dalam banyak perkembangan baru termasuk kampanye melawan meningkatnya kekerasan di negara ini. Baik pemerintahan Habibie dan Wahid pada tahun 1998-2000 menunjukkan rasa hormat yang besar terhadap gerakan perempuan, seperti yang ditunjukkan dalam pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan oleh Habibie, yang dipimpin oleh Saparinah Sadli, dan pengangkatan Wahid atas Khofifah Indar Parawansa untuk memimpin Kementerian Pemberdayaan Perempuan.

2.2.2. Isu Gerakan Feminis Masa Kini

Permasalahan perempuan yang menjadi isu gerakan feminis kini masih menunjukkan kesamaan dengan permasalahan yang diperjuangkan gerakan wanita pada masa lalu. Isu yang menjadi fokus utama pergerakan feminis masa kini justru lebih kompleks sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat yang juga telah

dipengaruhi arus globalisasi. Gerakan feminisme juga semakin berkembang dan semakin kuat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Agenda gerakan perempuan Indonesia tidak bisa dibaca sebagai analog dengan gerakan feminis Barat, meskipun dipengaruhi oleh gagasan liberal Eropa pada permulaannya. Cita-cita kesetaraan untuk perempuan Indonesia dibangun di atas aspek pemberdayaan adat model feminitas: perempuan diakui karena peran penting dalam ekonomi rumah tangga dan tradisi budaya yang tidak mencegah wanita dari mengambil alih jabatan publik. Secara kuat inti dalam pergerakan wanita Indonesia telah menjadi penolakan terhadap model-model maskulin otoritas dalam hubungan keluarga, yang membuat perempuan rentan secara ekonomi. (Robinson, 2009 : 65)

Perkembangan feminisme Indonesia masa kini juga didukung oleh aktivitas digital yang berperan menyebarkan narasi gender dan feminisme. Tidak dipungkiri kekuatan media sosial dapat turut memberikan edukasi pada masyarakat tentang isu gender dan isu feminisme untuk mencapai kesetaraan gender. Melalui kampanye global “Women’s March” dan tagar #MeToo di media sosial menjadi ajang penganut feminis di Indonesia untuk mendapat dukungan khalayak. Kampanye Women’s March yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 2019 mengusung agenda utama untuk mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). (www.tirto.id diakses pada 4 Juli 2020 pukul 22.00 WIB)

Gerakan feminisme di Indonesia ternyata masih banyak menuai pro dan kontra. Woman’s March dan tagar #MeToo yang sempat ramai di media sosial diperangi dengan beberapa akun media sosial yang menolak gerakan feminisme.

Akun media sosial Indonesia Tanpa Feminis yang mulai bergerak pada Maret 2019 menyimpulkan bahwa Indonesia tidak butuh feminisme. Jika kaum feminis menyatakan “tubuhku otoritasku” maka kaum penentang feminisme menyatakan “tubuhku bukan milikku, tapi milik Allah”. Dalam menanggapi fenomena ini, penulis dan pembicara yang kerap membawakan tema perempuan dan keislaman, Kalis Mardiasih mengatakan pada redaksi tirto.id bahwa kelompok penentang feminisme biasa menggunakan pemahaman Islam yang tidak memiliki perspektif gender. Kalis juga menambahkan, seharusnya kelompok anti feminisme bisa menjelaskan secara jelas masalah perempuan seperti buruh migran dan kesehatan reproduksi melalui pengetahuan Islam yang dimiliki agar menyelesaikan persoalan. (www.tirto.id diakses pada 4 Juli 2020 pukul 22.30 WIB)

Menanggapi pro kontra gerakan feminisme di Indonesia, Komisioner Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin juga memberikan pernyataan pada redaksi tirto.id bahwa kampanye *my body is mine* sebetulnya mengartikan tubuh perempuan adalah integritas dirinya yang tidak bisa dirusak atau dikuasai orang lain. Pemahaman tentang feminisme yang baik menurut Mariana akan menyadarkan tentang eksploitasi seksual dan kejahatan seksual yang mungkin terjadi. Hal tersebut juga didukung oleh data laporan kekerasan seksual yang semakin meningkat. (www.tirto.id diakses pada 4 Juli 2020 pukul 10.50 WIB)

Pada Sidang Paripurna II Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menetapkan lima isu prioritas yang ada dalam rencana kerja tahun 2020-2025, kelima isu tersebut yaitu :

1. Perempuan dalam konflik dan bencana
2. Perempuan pekerja
3. Perempuan tahanan dan serupa tahanan, termasuk kondisi panti rehabilitasi untuk disabilitas
4. Perempuan korban kekerasan seksual, termasuk yang berbasis siber dalam konteks keluarga dan lembaga pendidikan
5. Penguatan kelembagaan.

Komnas Perempuan juga menyebutkan untuk menyokong rencana kerja tersebut akan terus memperbarui instrument kerja berupa kebijakan maupun program serta menguatkan komitmen negara dan masyarakat untuk memastikan percepatan dan kemajuan pemajuan hak atas rasa aman, keadilan, dan kesetaraan bagi perempuan serta perlindungan terhadap perempuan. (www.komnasperempuan.go.id diakses pada 4 Juli 2020 pukul 20.00 WIB).

Isu permasalahan perempuan sesuai dengan yang ada dalam penelitian ini berkaitan dengan kekerasan seksual. Komnas Perempuan bahkan terus mengupayakan muatan hukum terkait pencegahan, perlindungan, penanganan dan pemulihan. Pada penelitian ini, isu kekerasan seksual dijadikan tema untuk dinarasikan dalam sebuah film yang berjudul *27 Steps of May*. Kekerasan seksual dalam industri film tidak hanya dituangkan dalam isi konten namun juga dapat terjadi pada pekerja film dibalik layar.

Pada akhir tahun 2018, survey daring yang dilakukan oleh *Never Okay Project* untuk mengetahui kondisi pelecehan seksual ditempat kerja. Survei ini

dilakukan pada 1.240 responden dari 34 provinsi di Indonesia dengan mengukur pengetahuan dan pengalaman responden. Menurut hasil survey, laki-laki maupun perempuan pernah mengalami pelecehan seksual. Perempuan lebih banyak mengalami pelecehan seksual di tempat kerja dalam bentuk pelecehan fisik sebesar 44 persen sedangkan laki-laki berkisar 40 persen. Pada industri kreatif/media, bentuk pelecehan seksual yang dialami adalah disentuh/digenggam orang lain tanpa persetujuan, berdiri terlalu dekat, dilirik dengan ekspresi seksual tertentu dan digoda rekan kerja/bawahan dengan bernuansa seksual. (BEKRAF, 2019 : 21)

Potensi kekerasan seksual terhadap pekerja industri film juga terjadi pada masa kini. Meskipun pekerja film terus meningkat setiap tahun, namun tetap ada kesenjangan jumlah pekerja perempuan dan laki-laki. Dominasi jumlah pekerja film laki-laki ini memungkinkan adanya pelecehan seksual terhadap pekerja wanita sehingga sudah seharusnya asosiasi pekerja film mencari cara untuk memaksimalkan upaya perlindungan terhadap pekerja industri film dengan mengikutsertakan pemerintah serta investor sehingga industri film yang sedang berkembang ini dapat tetap memenuhi hak bagi keamanan pekerja film.

Kekerasan seksual dalam industri film juga termanifestasikan sebagai tema film. Adegan seks, kekerasan dan emosi yang berlebihan tidak hanya diletakkan pada tubuh di layar (terutama tubuh perempuan dieksploitasi secara seksual) tetapi juga memiliki efek fisik pada tubuh penonton yang terkait dengan fantasi asli - rayuan dan pornografi, pengebirian dan kengerian. (McCabe, 2004 : 98)

Dalam studi kasus lain oleh Haskell pada “Reverence to Rape” memperlihatkan pandangan bioskop Amerika dan penggambarannya tentang perempuan. Dia menjelaskan pergeseran dekade demi dekade dalam representasi perempuan sebagai busur dari 'penghormatan' (era diam) menjadi 'pemeriksaan' (Hollywood pada tahun 1960 dan 1970). Pergeseran ini kemudian menghasilkan mitos 'penundukan dan pengorbanan' perempuan yang diibaratkan dari 'Gadis-gadis Victoria' tahun 1910-an dan 1920-an bagai dewi-dewi seks yang didewakan kemudian menjadi 'pengecut (dan jahat) femmes fatales (penggoda) dari fantasi pria tradisional'. Penghormatan semakin beralih ke kekerasan seksual dan kebencian terhadap wanita. (McCabe, 2004 : 8)

Film secara historis kemudian menutupi pencapaian perempuan dan terus menerus mempromosikan sudut pandang pria. Film kemudian mereproduksi realitas sosial dan mengaburkan pengalaman perempuan yang ada pada realitas tersebut. Namun film sebetulnya tidak mewakili sikap ideologis tertentu. Dorongan bawah sadar pekerja film maupun penonton dan adanya represi budaya lebih menentukan daripada sekedar melihat bagaimana wanita terwakili di layar. Kondisi sosial yang dianggap tabu semakin mengkondisikan citra feminitas yang selalu ditampilkan dalam layar (McCabe, 2004 : 9).